
Transisi Berkeadilan
menuju Dekarbonisasi
di Asia-Pasifik

ClimateScapes Asia-Pasifik

*Mengeksplorasi peluang, tantangan dan
kompromi menuju transisi berkeadilan untuk
dekarbonisasi*

Februari 2023

Peter Howson
Rini Astuti
Oliver Hensengerth
Sara Kindon

Tentang para penulis

Dr Peter Howson adalah Senior Lecturer di Department of Geography and Environmental Sciences di Northumbria University. Dr Rini Astuti adalah seorang Research Fellow di Australian National University. Dr Oliver Hensengerth adalah seorang Associate Professor di Department of Geography and Environmental Sciences di Northumbria University. Professor Sara Kindon adalah Professor School of Geography, Environment and Earth Sciences di Victoria University of Wellington.

Tentang Transisi Berkeadilan menuju Dekarbonisasi di Asia-Pasifik

Bekerja sama dalam kemitraan dengan berbagai tim dari UK Science & Innovation Network, program ini mempelajari bagaimana transisi berkeadilan sementara mengatasi perubahan iklim dan keanekaragaman hayati juga merupakan kunci dalam mendukung ekonomi dan masyarakat inklusif pada masa mendatang. Melalui program ini, the Academy menghibahkan dana ke tujuh proyek penelitian yang menyelidiki berbagai tindakan yang diperlukan di Asia-Pasifik untuk mengatasi perubahan iklim dan kehilangan keanekaragaman hayati, untuk mengidentifikasi berbagai peluang bagi ekonomi dan masyarakat dekarbonisasi, dan merekomendasikan berbagai pilihan serta jalan bagi komunitas, para pekerja, berbagai bisnis, para pembuat kebijakan dan masyarakat umum yang lebih luas. Program ini didanai oleh Department for Business, Energy and Industrial Strategy Inggris.

Daftar isi

Ringkasan eksekutif	4
Pengantar	5
Lanskap kawasan hutan	9
Lanskap kawasan samudra	14
Lanskap kawasan sungai	17
Kesimpulan	19
Referensi	21
Tentang the Academy	22

Ringkasan eksekutif

Tujuan laporan ini adalah memberi konteks latar belakang untuk strategi dekarbonisasi di seluruh wilayah Asia-Pasifik. Dengan mengkaji berbagai kebijakan yang ada dan kepentingan pemangku kepentingan, sambil berfokus pada studi kasus tertentu, kami memberi berbagai rekomendasi untuk mempromosikan transisi berkeadilan bagi keberlanjutan. Kami juga menyoroti tantangan dan kompromi dalam memenuhi objektif dekarbonisasi berdasarkan wilayah. Kami memanfaatkan pendekatan multilanskap dan ekologi politis regional untuk mempertimbangkan berbagai tantangan sosial, politis, dan ekonomi yang saling bersilangan menuju dekarbonisasi di seluruh paket kerja yang saling terhubung, ini termasuk: 1) Lanskap kawasan sungai, 2) Lanskap kawasan hutan, dan 3) Lanskap kawasan samudra.

Riset ekologi politis feminis kami dan metode etnografis berdasarkan kasus menantang naratif geopolitis yang dominan yang mengorbitkan berbagai komitmen regional untuk dekarbonisasi, dan berbagai gagasan transisi berkeadilan. Data empiris kami memanfaatkan gabungan metode kualitatif dan etnografis, menempatkan tim peneliti di dalam rumah, dapur, ladang, perkebunan dan perahu pencari ikan para peserta. Dari berbagai sudut pandang yang menguntungkan ini kami mampu mengamati ragam perilaku yang dimainkan oleh kaum wanita dan pria dalam hubungan dengan satu sama lain dan keluarga serta tetangga mereka, sambil menggunakan berbagai macam alat bantu dan perantara. Kami juga mampu berfokus pada hubungan akrab yang bila tidak diamati mungkin terabaikan, dan mengajukan pertanyaan yang bila tidak ditanyakan akan terlewatkan.

Sementara banyak usaha telah dilakukan untuk memahami implikasi sosial-ekologis transisi energi bersih di wilayah tersebut, kami memahami dekarbonisasi baik sebagai langkah teknis maupun politis untuk memitigasi emisi gas rumah kaca antropogenik. Langkah-langkah seperti itu termasuk pendekatan berbasis pasar, berbasis kinerja, dan berbasis masyarakat. Menggunakan pendekatan multilanskap, kami berniat untuk memahami biaya yang dapat ditoleransi dan manfaat dekarbonisasi bagi warga yang bergantung pada lanskap ini. Seperti apa hendaknya biaya dan bentuk manfaat ini dan untuk siapa? Bagaimana kebijakan dekarbonisasi dapat terkait klaim pengetahuan alternatif dan membebaskan? Bagaimana prakarsa-prakarsa seperti itu dapat membangun kapasitas dan kapabilitas lokal untuk adaptasi, mitigasi dan ketahanan perubahan iklim? Menanggapi berbagai isu keadilan sosial dan lingkungan itu tidak dapat dipisahkan dari mengembangkan solusi yang secara bersamaan mengatasi krisis iklim, hilangnya keanekaragaman hayati peningkatan ketidaksetaraan.

Pengantar

Penyebab dan dampak perubahan iklim yang dirasakan di mana pun tidak ada yang seakut seperti yang dirasakan di Asia-Pasifik. Populasi terbesar di dunia. Bagian dari ekonomi global yang paling cepat bertumbuh. Dua dari tiga negara dengan emisi karbon dioksida terbesar. Pangsa emisi terbesar di dunia. Kawasan ini merupakan tempat keberadaan beberapa dari negara-negara permukaan rendah dan rentan, dan paling banyak terpapar peristiwa cuaca yang ekstrem. Asia-Pasifik juga menjadi tempat keberadaan populasi termuda dan banyak pemimpin global dalam teknologi hijau. Keberhasilan bertransisi ke dekarbonisasi di sini, akan mengubah arah krisis iklim. Kegagalan akan memicu efek domino global (IMF, 2021).

Dekarbonisasi yang cepat dari ekonomi kawasan ini dengan manfaat yang tak terukur dari penawaran ekuitas untuk generasi masa kini dan masa mendatang. Tugas yang mendesak untuk mengatasi perubahan iklim juga mendasar bagi prinsip pembangunan berkelanjutan, yang dijabarkan, oleh Komisi Brundtland (1984: 43) sebagai, 'pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa membahayakan kemampuan generasi masa mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri'. Berbeda dengan prinsip ini, suatu pendekatan ke dekarbonisasi yang menunda aksi iklim yang efektif ke kaum termiskin, dan/atau ke masa mendatang, misalnya, menggunakan target untuk pengurangan emisi pada masa mendatang, dan pembangunan teknologi hijau yang belum terbukti, yang secara tidak proporsional membahayakan kemampuan generasi masa depan untuk memenuhi target mereka sendiri. Ini juga menghalangi negara-negara termiskin akan pembangunan berkelanjutan.

Transisi berkeadilan menuju dekarbonisasi

Organisasi keadilan pekerja dan lingkungan telah menyediakan berbagai perangkat dan teori, yang dapat diterapkan untuk membantu memastikan biaya dan manfaat dari intervensi hijau di kawasan tersebut setimpal. Tetapi bertransisi menuju dekarbonisasi di seluruh ekonomi Asia-Pasifik akan menghasilkan kompromi. Akan ada pemenang dan yang tertinggal karena biaya dan keuntungan yang terkait jatuh secara tidak merata pada berbagai masyarakat yang berbeda, baik sekarang maupun pada masa mendatang. Implikasi antargenerasi dari program-program dekarbonisasi tidak dapat berlebih-lebihan. Perubahan mendadak pada sektor energi di Inggris dan AS, misalnya, telah meninggalkan kesan yang buruk di masyarakat yang terpaksa bergeser ke mata pencaharian yang tidak terjamin.

Dalam memaksakan dekarbonisasi regional, korban sampingan yang tidak dapat diterima ini telah mendorong imbauan bagi 'transisi berkeadilan'. Sementara istilah ini makin lazim dalam wacana publik, 'transisi berkeadilan' masih tetap memiliki definisi yang bermacam-macam. Pada Sesi ke-102 (2013), International Labour Conference (Konferensi Buruh Internasional) mengadopsi suatu resolusi dan seperangkat kesimpulan, menyangkut pembangunan berkelanjutan, mata pencaharian yang layak dan pekerjaan hijau mengajukan kerangka kerja kebijakan bagi suatu 'transisi berkeadilan'. Bagi ekonomi industri/pascaindustri, konsep 'transisi berkeadilan' yang berorientasi pada kaum pekerja itu dapat dibenarkan dan esensial mengingat polarisasi politik yang dalam pada saat ini dan ketegangan antara 'pekerjaan vs lingkungan'. Menurut ILO (Organisasi Buruh Internasional) transisi berkeadilan dapat dimungkinkan melalui empat pilar Agenda Pekerjaan Layak,

yang meliputi: 1) dialog sosial, 2) perlindungan sosial, 3) hak di tempat kerja, dan 4) pekerjaan. Pilar-pilar ini, menurut argumentasi mereka, adalah komponen penting yang harus ada dalam pembangunan berkelanjutan dan harus berada pada inti berbagai kebijakan bagi pertumbuhan dan pembangunan yang kuat, berkelanjutan, dan inklusif. Tetapi, transisi berkeadilan ini tidak pernah dapat menjadi lintasan yang sesuai untuk semua (*one-size-fits-all*).

Lebih dari *one-size-fits-all*

Laporan ini memadukan riset dari tiga kolaborasi internasional yang mengeksplorasi transisi menuju keadilan sosial dan lingkungan bagi mitigasi, adaptasi, dan ketahanan perubahan iklim di seluruh Asia Pasifik. Ini meliputi:

- 1) Living Deltas–proyek yang dibiayai UKRI yang mengeksplorasi masa depan delta yang berkelanjutan di Asia Selatan dan Tenggara,
- 2) proyek dari Royal Society of New Zealand Marsden Fund yang mengeksplorasi ekologi politis perlindungan hutan di Asia-Pasifik, dan
- 3) proyek yang didukung oleh UK Overseas Territories Conservation Forum (UKOTCF), mengeksplorasi ekologi politis Kawasan Konservasi Perairan (Marine Protected Areas) yang besar di Pasifik.

Melalui jaringan kemitraan regional, kami melibatkan portofolio besar tentang perubahan iklim berbasis alam yang terus berlangsung dan prakarsa dekarbonisasi di negara-negara di seluruh Asia-Pasifik. Kami memanfaatkan pendekatan multilanskap dan ekologi politis regional untuk mempertimbangkan berbagai tantangan sosial, politis, dan ekonomi yang saling bersilangan menuju dekarbonisasi di seluruh paket kerja yang saling terhubung, yang meliputi: 1) Lanskap kawasan sungai, 2) Lanskap kawasan hutan, dan 3) Lanskap kawasan samudra. Dalam melaksanakannya, kami berniat untuk menanggapi tiga pertanyaan berikut:

- 1) Bagaimana kaum muda memahami ‘transisi berkeadilan’, yakni, kompromi apa yang mereka hadapi, pengorbanan apa yang rela mereka lakukan, dan apa yang mereka harapkan dari para pembuat kebijakan untuk menjamin masa depan berkelanjutan?
- 2) Bagaimana kaum muda terlibat dengan perubahan lingkungan dan bagaimana mereka memahami serta membingkai berbagai ancaman yang muncul bagi mata pencaharian mereka?
- 3) Bagaimana kaum muda mengambil tindakan bagi adaptasi dan mitigasi iklim?

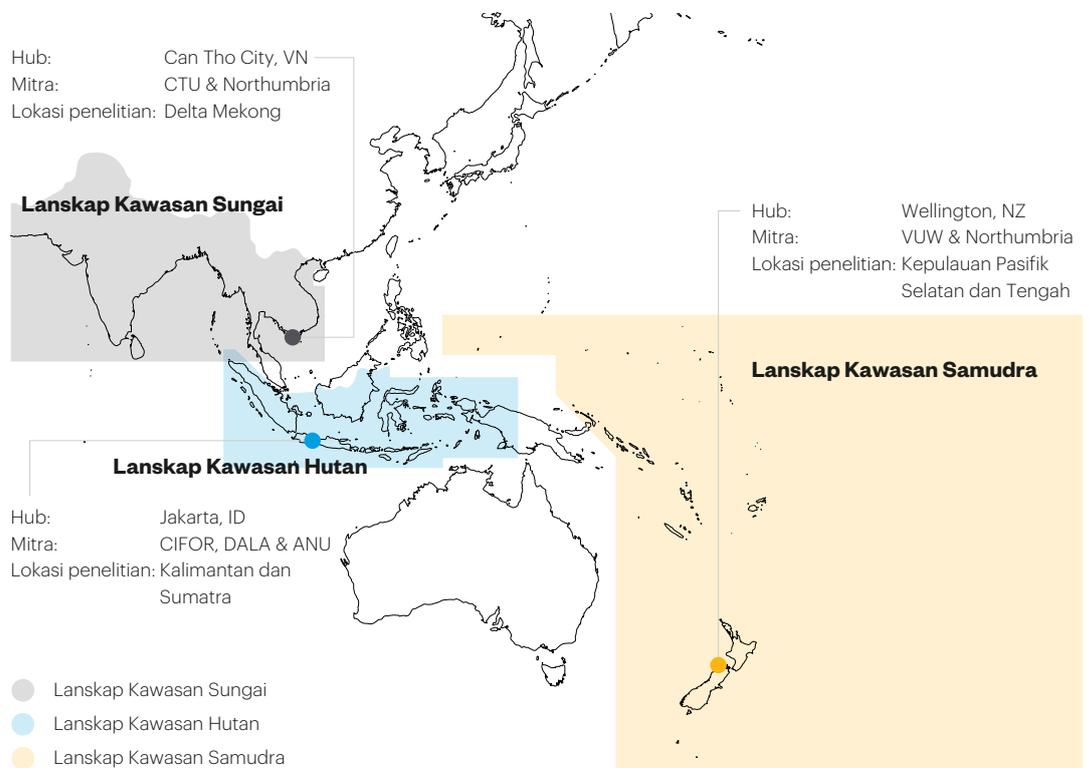
Dengan menggunakan analisis tekstual, wawancara, dan riset tindakan yang partisipatoris kami mempelajari peranan kaum muda dalam membayangkan dan memetakan masa depan bagi kehidupan di zona pesisir, delta sungai besar, dan hutan tropis pada waktu yang mengalami perubahan lingkungan yang cepat.

Pendekatan lanskap

Sementara banyak usaha telah dilakukan untuk memahami implikasi sosial-ekologis transisi energi bersih di wilayah tersebut, kami memahami dekarbonisasi baik sebagai langkah teknis maupun politis untuk memitigasi emisi gas rumah kaca antropogenik. Langkah-langkah seperti itu termasuk pendekatan berbasis pasar,

berbasis kinerja, dan berbasis masyarakat. Menggunakan pendekatan multilanskap, kami berniat untuk memahami biaya yang dapat ditoleransi dan manfaat dekarbonisasi bagi warga yang bergantung pada lanskap ini. Seperti apa hendaknya biaya dan bentuk manfaat ini dan untuk siapa? Bagaimana kebijakan dekarbonisasi dapat terkait klaim pengetahuan alternatif dan membebaskan? Bagaimana prakarsa-prakarsa seperti itu dapat membangun kapasitas dan kapabilitas lokal untuk adaptasi, mitigasi dan ketahanan perubahan iklim? Menanggapi berbagai isu keadilan sosial dan lingkungan tidak dapat dipisahkan dari mengembangkan solusi yang secara bersamaan mengatasi krisis iklim, hilangnya keanekaragaman hayati peningkatan ketidaksetaraan.

Gambar 1: ClimateScapes Asia-Pasifik



Lanskap kawasan samudra, lanskap kawasan sungai, dan lanskap kawasan hutan dikaji melalui laporan ini menggunakan bukti yang dikumpulkan di seluruh wilayah Asia-Pasifik memastikan kajian lanskap berfokus pada wilayah tersebut namun dihubungkan dengan riset lokal dan pusat kebijakan, yang meliputi Vietnam, Indonesia, dan Selandia Baru.

Untuk menandingi naratif dominan yang mengorbitkan komitmen regional untuk dekarbonisasi, kami menggunakan pendekatan etnografis berdasarkan kasus dan ekologi politis feminis. Menggunakan kombinasi metode kualitatif dan etnografis, data empiris kami diperoleh dari rumah, dapur, ladang, perkebunan, dan kapal perahu penangkap ikan para peserta. Dari posisi ini kami memantau perilaku yang dimainkan oleh kaum wanita dan pria dalam hubungan dengan satu sama lain dan keluarga serta tetangga mereka, sambil menggunakan berbagai macam alat bantu dan perantara. Kami juga berfokus pada hubungan akrab yang bila tidak diamati mungkin terabaikan, dan mengajukan pertanyaan yang bila tidak ditanyakan akan terlewat.

Struktur ringkasan laporan

Bagian selanjutnya laporan singkat ini disusun menjadi tiga bagian, masing-masing selanjutnya mengkaji semua lanskap yang terpisah namun berkaitan dengan pendekatan regional terhadap dekarbonisasi yang dikaji. Bagian ClimateScape memiliki 4 objektif: 1) memberi konteks latar belakang bagi strategi dekarbonisasi di seluruh lanskap yang ditentukan, 2) meninjau arena kebijakan yang ada dan sedang dikembangkan tempat transisi menuju keberlanjutan sedang berlangsung, 3) mengidentifikasi pemangku kepentingan utama sementara berfokus pada contoh-contoh studi kasus. Contoh-contoh ini menempatkan tujuan kebijakan regional yang abstrak dalam konteks lokal. Dan 4) mengusulkan rekomendasi ke transisi berkeadilan bagi dekarbonisasi. Laporan ini menyimpulkan dengan sintesis singkat berbagai rekomendasi berikut ini, serta menyorot bidang-bidang untuk penelitian lebih lanjut.

Lanskap kawasan hutan

Seraya negara-negara dengan ekonomi yang berkembang di wilayah Asia Tenggara bertumbuh, kualitas lingkungan menurun karena eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan (Nathaniel, 2021). Kegiatan ekonomi intensif menghasilkan eksternalitas lingkungan dalam bentuk polusi dan emisi karbon dengan implikasi lintas batas yang terkait, seperti asap di wilayah Malaysia, Singapura dan Indonesia di Asia Tenggara (Khan, 2019). Meskipun semua negara di wilayah tersebut mengalami ancaman lingkungan yang serupa dari sektor intensif karbon, akibat lingkungan akan didistribusikan secara tidak merata tergantung pada situasi sosial ekonomi dan geografis (Mendelsohn et al., 2006). Pada tingkat masyarakat, ini akan berdampak secara berbeda pada mereka yang memiliki berbagai langkah untuk beradaptasi terhadap perubahan lingkungan dibandingkan dengan mereka yang tidak memiliki daya untuk melakukannya.

Asia Tenggara merupakan tempat bagi 15% dari hutan tropis dunia tetapi mengalami tingkat tertinggi deforestasi di wilayah tropis. Agribisnis dan perluasan pemukiman manusia adalah penyebab utama deforestasi di wilayah yang menyumbang pada emisi karbon antropogenik, dengan Indonesia menyumbangkan hingga 62% kemusnahan hutan, diikuti oleh Malaysia (17%), Myanmar (5%) dan Kamboja (5%). Asia Tenggara juga merupakan tempat sekitar 14% karbon gambut dunia berlokasi, dengan sebagian besar berada di Indonesia (65%) dan Malaysia (10%).

Di Indonesia, kerusakan ekologis yang disebabkan oleh perluasan agribisnis telah menyumbang kerusakan besar dan pembakaran di banyak wilayah pedalaman hutan (Astuti, 2021). Ini telah menjadi penyebab utama dilema asap lintas batas dan emisi karbon di Asia Tenggara, terutama di Indonesia (Miller et al, 2021). Perusahaan industri bukanlah satu-satunya pelaku utama, petani lokal makin terjerat dalam menyebabkan tekanan antropogenik.

Produsen pertanian kecil kini bertanggung jawab atas 40% hasil komoditas kelapa sawit Indonesia dan menyumbang dampak lingkungan dalam porsi yang signifikan dari sektor tersebut. Komersialisasi agrikultur telah membuka berbagai peluang bagi petani muda pertanian kecil di pedesaan untuk terlibat dalam membudidayakan tanaman dengan panen yang berlimpah dan pertanian intensif monokultur seperti kelapa sawit (Howson 2017; Howson & Kindon, 2015). Transisi pertanian ini telah mengubah pola akses dan kepemilikan tanah di daerah pedesaan. Sementara beberapa petani muda mampu meningkatkan mata pencaharian mereka dan mengakumulasi tanah, lainnya makin jatuh ke dalam kemiskinan dan tidak memiliki tanah (Li, 2014). Lahan berpagar yang didukung pemerintah dan kesepakatan lahan swasta berskala besar telah mengurangi ketersediaan lahan hutan milik bersama di daerah pedesaan (Barney & Van Der Meer Simo, 2019). Tangkapan yang mencari sewaan dan elit dalam sektor yang intensif karbon memperlebar kesenjangan kekayaan antara yang paling kaya dan paling miskin. Laba yang diakumulasi dari industri ekstraktif berkembang secara tidak proporsional dengan dampak sosial ekonomi yang secara negatif memengaruhi kualitas hidup kaum muda yang termiskin di Indonesia (Oxfam, 2017). Sebagai contoh, kekayaan kolektif empat pria terkaya Indonesia adalah \$25 miliar, dan ini lebih dari total kekayaan 100 juta orang termiskin (Oxfam, 2017).

Kami melaksanakan tiga studi kasus di 1) Provinsi Jambi, 2) Kepulauan Mentawai, dan 3) Provinsi Kalimantan Tengah, Indonesia (Gambar 1). Mewawancarai

para petani muda dan aktivis muda untuk memahami aspirasi mereka pada masa mendatang sehubungan dengan jaminan mata pencaharian mereka dan dekarbonisasi di Indonesia.

Gambar 2: Lokasi tiga studi kasus Lanskap Kawasan Hutan



Berdasarkan temuan-temuan dari riset ini, rekomendasi berikut untuk mencapai transisi berkeadilan menuju dekarbonisasi di sektor pertanian dan kehutanan diajukan:

- **Memprioritaskan kebijakan yang memfasilitasi pencapaian kepemilikan tanah yang berkeadilan dan terjamin untuk hutan dan masyarakat asli**

Pemerintah Indonesia telah mulai memberi perhatian yang lebih besar terhadap hak-hak masyarakat berkenaan dengan hutan dan lahan gambut melalui program kehutanan sosial. Program ini membuka 12,7 juta hektar area hutan bagi akses masyarakat dan bertujuan mengatasi ketidakadilan kepemilikan tanah. Kebijakan nasional dalam prakarsa mitigasi iklim, seperti, dalam program Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (REDD+), juga telah menyorot pentingnya jaminan kepemilikan tanah demi keberhasilan penerapan prakarsa dekarbonisasi.

- **Membina partisipasi tulus sektor swasta dalam prakarsa dekarbonisasi**

Semua entitas sektor swasta yang bekerja di sektor tanah dan kehutanan itu sangat penting bagi adaptasi dan mitigasi iklim. Dengan daya dan infrastruktur, mereka dapat berperan sebagai pemberdaya dan pengarah utama dalam upaya mencapai transisi untuk menurunkan pembentukan karbon dari sektor kehutanan dan pertanian. Sektor swasta dapat mengembangkan desain dan penyampaian banyak dari layanan adaptasi dan mitigasi iklim dan dengan tulus menuruti pengaman sosial dan lingkungan serta instrumen lainnya. Bahkan

sektor swasta juga harus mengambil peranan yang lebih besar dalam membiayai adaptasi dan mitigasi iklim (World Bank, 2020). Dalam hal kebijakan, sektor swasta memerlukan kerangka kerja pemberdaya yang kokoh untuk berinvestasi, yang disediakan oleh kebijakan dan insentif, yang memberi tanda yang tepat bagi para investor. Pengerahan berbagai instrumen dan mekanisme yang telah terbukti, seperti pengaman sosial dan lingkungan atau FPIC, dapat membantu sektor swasta untuk mengurangi biaya modal dan risiko investasi.

- **Memobilisasi sumber daya dan pembiayaan bagi prakarsa transisi berkeadilan yang sukses**

Mayoritas pemangku kepentingan kebijakan menekankan pentingnya mobilisasi sumber daya untuk menopang dekarbonisasi di sektor kehutanan dan perubahan iklim. Namun, kami menentang konsep bahwa pemerintah nasional hanya dapat memimpin transisi sistematis menuju ekonomi hijau melalui pasar. Alih-alih, kami mengimbau adanya komitmen pembiayaan yang serius dari negara-negara maju untuk memfasilitasi negara-negara yang perkembangannya paling tertinggal untuk mencapai transisi berkeadilan di sektor kehutanan dan pertanian.

- **Perlindungan dan pemulihan lahan gambut untuk dekarbonisasi sektor kehutanan Indonesia**

Indonesia menjadi tempat keberadaan lebih dari 15 juta hektar lahan gambut. Lahan gambut adalah lapisan dari unsur tanaman yang terurai yang dengan ciri-ciri memiliki keasaman dan rendah nutrien yang tetap tergenang air dalam keadaan alaminya. Lahan gambut merupakan tanah yang kaya karbon dan cara-cara penggunaannya di Indonesia didominasi oleh perkebunan monokultur berskala besar. Penggunaan lahan gambut diawali dengan mitologi bahwa lahan ini adalah lahan tanah tandus yang kosong, yang oleh karena itu rawa-rawa yang kaya karbon diasosiasikan dengan lahan yang kurang dimanfaatkan dan tidak produktif. Jutaan hektar lahan gambut dikonversi menjadi perkebunan pertanian sambil mengabaikan hak masyarakat setempat dan asli. Dalam 30 tahun terakhir, 11 juta hektar lahan gambut telah dikonversi menjadi perkebunan kelapa sawit. Ini berakibat dalam konflik panjang dan dalam tentang kepemilikan antara masyarakat dan pemegang konsesi atau antara masyarakat dan pemerintah lokal dan nasional.

- **Mendukung sektor perikanan darat berskala kecil untuk menjaga hutan bakau**

Sebagai negara kepulauan, Indonesia menimbulkan citra negara maritim yang makmur berkat karunia pulau-pulainya yang kaya, tempat masyarakat nelayan yang beragam dan tradisi sejak berabad-abad lampau di semua pesisir dan dengan desa-desa yang tersebar di sana tempat masyarakat menggabungkan kegiatan pertanian dan perikanan. Karena memiliki garis pantai terpanjang di dunia, Indonesia seharusnya menjadi mercusuar bagi tata kelola perikanan dan lingkungan. Secara mengejutkan, perikanan merupakan satu dari berbagai sektor ekonomi nonenergi penting (ADB, 2020) yang pada umumnya terlewat dalam percakapan tentang adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Sementara itu, perubahan iklim telah memberi dampak yang sangat buruk bagi sektor perikanan, baik perikanan laut maupun darat, dan baik dalam hal fisik maupun biologis. Peningkatan permukaan air laut, asidifikasi (pengasaman) air laut, dan perubahan presipitasi, air tanah, dan aliran sungai telah berdampak secara signifikan pada terumbu karang, lahan basah, sungai, danau, hutan bakau, dan muara. Ini memerlukan langkah-langkah adaptif untuk mengeksplorasi peluang dan meminimalkan dampak pada sistem perikanan dan akuakultur. Hukum yang

mengatur pengelolaan ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil (No. 1/2014 dan No.27/2007) dimaksudkan untuk melindungi sektor perikanan tetapi pertanyaan tentang caranya tetap persisten.

- **Memperbaiki pengelolaan kawasan lindung untuk dekarbonisasi**

Kawasan lindung telah dirancang secara global sebagai alat penting dalam pencarian pembangunan berkelanjutan dan perjuangan melawan perubahan iklim. Beroperasi pada tingkat lanskap, taman nasional atau suaka satwa liar menyediakan tidak saja konservasi keanekaragaman hayati tetapi juga layanan ekologis, sosial, budaya, dan ekonomi yang esensial. Di banyak tempat, kawasan lindung bahkan merupakan satu-satunya tempat yang menjadi tempat perlindungan bagi manusia ketika terjadi bencana. Indonesia secara impresif telah membuat lebih dari 36 juta hektar kawasan lindung laut dan darat. Sebagian besar dari kawasan lindung dikelola dengan baik dan tetap menjadi suaka ekosistem alami di semua negara. Kehadiran tumbuh-tumbuhan alami, tanah, dan spesies laut penting seperti rumput laut dan bakau di kawasan lindung telah memainkan peranan besar dalam mitigasi iklim, mencegah kehilangan karbon dan menangkap karbon dioksida dari atmosfer. Kawasan lindung juga menyediakan layanan ekosistem yang esensial tidak saja untuk hewan dan tumbuh-tumbuhan tetapi juga untuk masyarakat di seberang perbatasan.

- **Mengomunikasikan pesan yang efektif dan mudah kepada dan oleh kaum muda**

Agar efektif, mengomunikasikan topik-topik terkait dekarbonisasi dan perubahan iklim kepada masyarakat dan kaum muda perlu dilakukan dengan cara dan bahasa yang dapat dipahami oleh mereka. Karena teknologi Informasi memainkan peran yang signifikan dalam kehidupan kaum muda, media sosial dan para *influencer* muda juga merupakan bagian penting dari pembahasan iklim. Para *influencer* muda merancang konten media sosial mereka dengan kata-kata sederhana, dikenal dan menggunakan konteks lokal serta kadang-kadang juga dalam bahasa setempat. Untuk menyampaikan pesan yang menarik dan agar dapat mencapai pengikut, para *influencer* menghubungkan antara berbagai isu perubahan iklim dan gaya hidup kaum muda. Misalnya, mengemas pesan iklim melalui kopi (kaum muda Indonesia saat ini melewatkan banyak waktu di kafe) telah terbukti lebih menarik dan mendapat banyak perhatian dari kaum muda karena mereka dapat menghubungkan krisis iklim dan kopi yang mereka minum. Sampah plastik, ekonomi hijau, pekerjaan hijau, dan kebijakan perlindungan lingkungan berada di antara konten media sosial teratas yang paling memikat perhatian kaum muda. Sayangnya, kaum muda kurang terlibat dalam konten media sosial yang meliput penduduk asli. Oleh karena itu, meningkatkan perhatian kaum muda pada isu penduduk asli itu penting.

- **Menyingkirkan hambatan birokratis untuk meningkatkan partisipasi kaum muda dalam dekarbonisasi**

Mayoritas program yang terkait iklim dari pemerintah untuk kaum muda tidak dirancang dengan semestinya dan diadaptasi bagi generasi muda yang dinamis. Birokrasi yang berlebihan, budaya formalitas, dan kurangnya transparansi mengikis kesediaan organisasi pemuda dan perorangan untuk berpartisipasi dalam program pemerintah dalam perubahan iklim. Budaya birokrasi mengilustrasikan hubungan dan perilaku paternalistik yang diciptakan oleh kaum dewasa yang mengendalikan kekuasaan dan generasi muda. Menyingkirkan penghambat birokrasi dan sepenuhnya mendukung kegiatan kaum muda akan meningkatkan partisipasi mereka dalam prakarsa dekarbonisasi.

Di Thailand dan Indonesia, organisasi pemuda dalam berbagai isu lingkungan telah berada dalam tekanan politis dari berbagai badan pemerintah. Pejabat berwenang pemerintah telah memantau secara ketat dan makin menekan organisasi pemuda, terutama yang bekerja dalam isu lingkungan yang mengkritik agenda pembangunan pemerintah (Wardhana 2021). Tekanan ini menunjukkan bahwa kaum muda tidak dianggap sebagai pemangku kepentingan yang penting yang mengartikulasikan suara mereka tentang isu politis yang penting. Ini juga mengilustrasikan diabaikannya peranan politis kaum muda dalam memiliki perspektif hijau dan mengambil sikap sejati tentang melestarikan lingkungan. Pengerahan tekanan birokratis dan politis dalam program terbatas dan tidak bertahan lama yang disponsori pemerintah yang melibatkan generasi muda berkemungkinan dipandang sebagai strategi politis untuk menjinakkan dan menyalurkan aspirasi politis dari kaum muda dalam cara yang menekan mobilisasi politis yang sejati. Oleh karena itu, kami menyarankan pejabat berwenang pemerintah untuk berkolaborasi dengan para aktivis muda dan mengizinkan mereka untuk membentuk proses pembuatan kebijakan, terutama, tentang berbagai isu yang penting bagi mereka.

- **Pengarusutamaan kesetaraan gender untuk mendukung kaum wanita muda**

Di Indonesia terdapat tatanan sosial yang tidak tertulis yang mengharapka kaum muda untuk sungguh-sungguh mematuhi dan menurut pada orang dewasa daripada menjadi agen perubahan. Lebih-lebih lagi, stereotip gender menyumbang pada dirugikannya wanita muda dalam berpartisipasi secara aktif dan memperoleh akses ke prakarsa-prakarsa dekarbonisasi. Misalnya, dalam studi kasus kami, beberapa wanita Dayak muda melaporkan bahwa mereka mendapat komentar yang tidak membantu dari kaum dewasa tentang bagaimana mereka harus tinggal di rumah untuk melindungi kulit mereka agar tidak menjadi gelap karena mereka membantu kegiatan penghutanan kembali di bawah terik matahari (wanita berkulit terang dianggap lebih menarik daripada kulit gelap). Tatanan sosial budaya yang bias seperti ini (misalnya kaum muda sebagai pelaku yang tidak bertanggung jawab dan stereotip tidak memberdayakan kaum wanita muda) bisa menghalangi partisipasi tulus mereka dan mengurangi rasa ingin tahu dan daya kreatif mereka.

- **Mengatasi ketidaksetaraan dan kemiskinan untuk mendukung keterlibatan kaum muda dalam mengembangkan strategi adaptasi dan mitigasi**

Ketidaksetaraan sosial ekonomi, dan kemiskinan yang ditimbulkan, adalah tantangan utama bagi kaum muda di seluruh wilayah Asia Tenggara saat mereka mengembangkan prakarsa adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Dalam dua dasawarsa terakhir, negara-negara di Asia Tenggara telah mengurangi kemiskinan ekstrem tetapi gagal menutup kesenjangan antara warga terkaya dan warga mereka lainnya. Riset penting jelas memperlihatkan bahwa wilayah dan penduduk miskin lebih banyak terkena dampak daripada wilayah dan penduduk kaya. Terutama di wilayah pedalaman dan yang kurang maju, kaum muda tinggal di tempat-tempat yang kaya sumber daya, tetapi di tempat mereka memiliki akses terbatas secara politis dan ekonomis, paling berkemungkinan menderita akibat pembangunan dan ekonomi intensif karbon berskala besar (pertambangan, penebangan hutan, perkebunan) dan problem lingkungan yang terkait seperti banjir, kekeringan, dan penyakit tropis. Mereka mungkin memiliki ketahanan fisik yang lebih kuat, tetapi dalam hal psikologis, mereka adalah pihak yang paling terkena dampak karena mereka merasa tidak berdaya dengan kurangnya modal sosial dan ekonomi. Di lingkungan perkotaan, kaum muda miskin tidak memiliki peluang di sistem pendidikan yang lebih baik. Mereka juga mungkin sekali sangat kekurangan peluang untuk memperoleh keterampilan dan sarana penting untuk menyiapkan mereka terhadap efek perubahan iklim dan beradaptasi terhadap efek seperti itu.

Lanskap kawasan samudra

Oseania adalah suatu kawasan budaya yang luar biasa beragam. Selain adanya sejumlah besar penduduk asli pulau, di sana juga terdapat banyak kaum migran India, Tionghoa, dan Indonesia. Berpindah dari kepulauan Polinesia yang lebih kecil guna mencari pekerjaan, pendidikan, dan peluang sosial yang lebih baik adalah hal biasa. Misalnya, lebih banyak orang yang lahir di Niue dan Kepulauan Cook tinggal di luar negeri daripada di negara kelahiran mereka. (Gambar 2).

Gambar 3: Peta Oseania dengan lokasi studi kasus di dalam kotak



Sebelum COP21, bangsa-bangsa Pasifik memperteguh komitmen mereka akan aksi transisi energi dan tujuan energi berkelanjutan di dalam kontribusi yang ditentukan secara nasional (NDC/Nationally Determined Contributions) mereka. Sasaran aksi ini adalah menempatkan mereka di garis depan tanggapan terhadap pemanasan global. Upaya memperoleh jaminan energi melalui energi terbarukan masuk akal mengingat dampak perubahan iklim di kawasan tersebut. 13 dari 14 Negara-negara Kepulauan Pasifik (PIC/Pacific Island Countries) telah mengkuantifikasi target energi terbarukan dalam NDC mereka (kapasitas terbarukan sejumlah hampir 2 GW) didukung oleh Regional NDC Pacific Hub.

Strategi untuk beradaptasi, dan memitigasi, perubahan iklim telah menjadi fokus penting bagi pemerintah untuk menargetkan masa depan dengan karbon rendah. Di kawasan Pasifik, tempat berbagai negara telah merasakan dampak perubahan iklim, beberapa pemangku kepentingan tertentu dianggap sebagai pemimpin internasional, dan lainnya tampak kurang memiliki suara atau kurang menarik perhatian. Tinjauan pustaka ini—dihasilkan sebagai kontribusi bagi proyek

ClimateScapes Asia-Pasifik yang lebih besar—membahas tema dan perdebatan di dalam naskah terkini tentang perubahan iklim dan dekarbonisasi di Pasifik. Tinjauan pustaka ini juga memanfaatkan pengetahuan akademis terkini mengenai bagaimana kaum muda dan kelompok-kelompok lain yang termarginalkan terlibat dalam aksi iklim dan dekarbonisasi di kawasan tersebut.

Secara luas telah dimaklumi bahwa Negara-negara Kepulauan Pasifik (PIC) adalah penyumbang terkecil Gas Rumah Kaca (GHG/Greenhouse Gases) tetapi secara tidak proporsional terkena dampak perubahan iklim. PIC telah berada di antara beberapa negara pertama yang merasakan dampak perubahan iklim termasuk peningkatan intensitas dan terjadinya siklon tropis dan banjir, demikian pula kenaikan permukaan air laut (Bradbury, 2021). Sebagai akibat dampak langsung ini, PIC telah menyusun berbagai kebijakan regional dan nasional untuk membatasi pemanasan global hingga di bawah 1,5°C, (lebih rendah dari Perjanjian Paris setinggi 2°C), dan untuk beradaptasi terhadap perubahan iklim.

Data studi kasus dihasilkan melalui wawancara online dan tatap muka serta tinjauan yang mendetail mengenai materi yang dipublikasikan. Empat lokasi pesisir yang sudah ditelaah meliputi:

- 1) Republik Palau
- 2) Aotearoa, Selandia Baru
- 3) Pitcairn Islands, dan
- 4) Tuvalu

Berdasarkan temuan-temuan dari riset ini, rekomendasi berikut untuk mencapai transisi berkeadilan menuju dekarbonisasi di zona pantai diajukan:

- Terminologi cenderung berbeda dalam berbagai dokumen kebijakan. Dokumen kebijakan nasional dan regional berfokus pada PIC sebagai LODS, dibandingkan dengan kebijakan internasional yang menggunakan istilah seperti SIDS dan ‘negara berkembang’ untuk menjabarkan PIC dan kawasan tersebut secara keseluruhan.
- Adaptasi lebih menonjol daripada mitigasi di sebagian besar PIC, atau kombinasi keduanya dapat terlihat ketika mengimplementasikan prakarsa perubahan iklim.
- Rasa keterdesakan dapat terlihat dalam dokumen kebijakan nasional, yang mencerminkan keadaan dampak terberat perubahan iklim dan pemanasan global dialami oleh PIC.
- Hubungan dan ekspektasi neo-kolonial terus berlangsung. Banyak kebijakan nasional dan regional, demikian pula berbagai perjanjian internasional menyorot perlunya ‘negara-negara maju’ membantu ‘negara-negara berkembang’ menuju masa depan rendah karbon karena negara-negara berkembang dipandang rentan dan memerlukan kemitraan agar kemajuan dapat dicapai.
- Meskipun ada hubungan yang terus berlangsung ini, sebagian besar PIC bertekad menjadi pemimpin dunia dalam berupaya menuju masa depan rendah karbon dan beradaptasi terhadap perubahan iklim.
- Sedikit fokus pada dekarbonisasi, diperlihatkan dengan kurangnya dokumen kebijakan regional dan nasional. Alih-alih, PIC berfokus pada strategi energi terbarukan dan beradaptasi terhadap tekanan-tekanan yang ada saat ini dari perubahan iklim.

- Karena adanya keberagaman di kawasan Pasifik, terdapat keberagaman dalam kebijakan, strategi dan rencana. Setiap PIC beragam secara geografis sehingga mengakibatkan penetapan prioritas prakarsa dan aksi nasional yang berbeda.
- Sebagian besar dokumen regional tidak memasukkan kaum muda sebagai pemangku kepentingan atau peserta dalam berbagai pendekatan terhadap adaptasi perubahan iklim, bahkan ketika mereka mengakui adanya marginalisasi kaum muda dan kelompok lainnya seperti kaum wanita. Sebaliknya, dokumen kebijakan nasional cenderung memasukkan kaum muda dan kelompok lain yang termarginalkan ke dalam strategi mereka, mengakui diperlukannya partisipasi mereka, namun banyak yang perlu diperbarui.
- Mengenali risiko yang spesifik, pengetahuan, komitmen dan hak kaum muda, wanita, penduduk asli, nelayan kecil dan masyarakat miskin yang terkait dari daerah pesisir di Pasifik.
- Menciptakan peluang pelibatan kebijakan yang memberdayakan bagi kaum muda dan kelompok-kelompok lain yang biasanya termarginalkan, yang menghindari konsultasi demi formalitas.
- Memperluas peluang dan dukungan bagi representasi kaum muda dalam pemerintahan nasional, delegasi nasional dan organisasi internasional yang bekerja pada bidang perubahan iklim, dekarbonisasi dan transisi berkeadilan.
- Mendukung investasi menjadi dana yang dapat diakses yang ditargetkan pada kaum muda yang bertransisi ke mata pencaharian yang lebih berkelanjutan (dekarbonisasi)–dengan memperhatikan etnisitas, lokasi geografis, keberagaman dan kemampuan gender.
- Sebanyak mungkin, membina pendekatan rancangan bersama terhadap adaptasi perubahan iklim, mitigasi dan dekarbonisasi yang mengintegrasikan pengetahuan lokal dengan pengetahuan ilmu pengetahuan dan teknologi Barat.
- Mendukung investasi menjadi dana dan bimbingan yang dapat diakses yang ditargetkan pada aksi perubahan iklim yang mencakup kaum muda guna membangun kapasitas untuk dekolonisasi dan keterhubungan yang lebih besar di seluruh kawasan.
- Meningkatkan upaya untuk mengatasi ketidaksetaraan gender di seluruh kawasan.
- Mengarusutamakan gender dan kesetaraan antargenerasi ke segala aspek tanggapan dan perencanaan terhadap perubahan iklim termasuk strategi dekarbonisasi dan transisi ke energi terbarukan.
- Memastikan proses untuk memperbarui dan mengimplementasikan Kontribusi yang Ditentukan Secara Nasional (NDC) melibatkan pakar gender dan kaum muda.
- Memastikan perwakilan yang setara di negara PIC kecil dan besar dalam berbagai forum kebijakan regional yang diasosiasikan dengan dekarbonisasi dan transisi berkeadilan.
- Berkolaborasi dengan gerakan yang dipimpin kaum muda untuk melobi tanggapan yang lebih cepat terhadap dekarbonisasi secara internasional.

Lanskap kawasan sungai

Delta Mekong (MD) terbentuk dari pengendapan sedimen dari Sungai Mekong, yang mengalir dari Dataran Tinggi Tibet di Tiongkok ke Laut Timur, melewati enam negara dalam perjalanannya termasuk Tiongkok, Myanmar, Republik Demokratik Rakyat Laos, Thailand, Kamboja dan Vietnam. Elevasi rata-rata Delta Mekong berkisar dari 0,5 hingga 1,2 m di atas permukaan laut, kecuali untuk beberapa area daratan di sepanjang perbatasan Kamboja, tempat lahan mencapai ketinggian hingga 12 m, elevasi bagian tengah delta berkisar dari 1,0 hingga 1,5 m sementara daerah pesisir memiliki elevasi setinggi 0,3–0,7 m (Renaud & Kuenzer, 2012).

Delta Mekong berlokasi di wilayah paling selatan Vietnam, meliputi 13 provinsi dan kota dengan luas alami total sekitar 40.604,7 km, 330 km dari perbatasan dengan Kamboja, lebih dari 700 km garis pesisir, dan 360.000 km² dari laut teritorial. Populasi saat ini sekitar 17,59 juta orang (2015). Delta Mekong memiliki cabang-cabang sungai yang saling terjalin, kanal, dan hutan-hutan yang tergenang banjir, tempat kelompok etnis Kinh, Khmer dan Cham tinggal berdampingan. Vietnam adalah salah satu negara yang dengan serius terpengaruh perubahan iklim dan kenaikan permukaan air laut. Delta Mekong terutama merupakan daerah yang rentan terhadap dampak perubahan iklim dan kenaikan permukaan air laut. Sebelum akhir abad ke-21, permukaan air laut di daerah pesisir Delta Mekong akan naik dari 62-82 cm (dengan tingkat emisi sedang) dan dari 85-105 cm (dengan tingkat emisi tinggi) (Lee & Truong An, 2018). Jika permukaan air laut naik setinggi 1 m, kira-kira 39% dari Delta Mekong akan kebanjiran, dan hampir 35% dari penduduk Delta Mekong akan terkena dampak secara langsung (Ministry of Natural Resources and Environment, 2012). Beberapa studi yang dilakukan berbagai lembaga penelitian dan provinsi Delta Mekong menunjukkan bahwa perubahan iklim pada beberapa dasawarsa terakhir telah menyebabkan peningkatan suhu dan kekeringan (Lee & Truong An, 2018), curah hujan yang bertambah besar (Vu et al., 2018), air asin dan permukaan air laut yang bertambah tinggi (Vu et al., 2018). Juga, peristiwa cuaca yang lebih ekstrem telah tercatat.

Dengan sumber daya tenaga kerja yang berlimpah dan alam yang menguntungkan dalam hal topografi, tanah, dan iklim, Delta Mekong dianggap sebagai lumbung padi, buah-buahan, dan makanan hasil laut seluruh negara tersebut. Namun, polusi lingkungan dan dampak lain dari perubahan iklim telah memberi dampak yang berat pada Delta Mekong. Di samping itu, terdapat banyak problem internal yang muncul di wilayah ini seperti: berkurangnya kualitas pertumbuhan, produktivitas tenaga kerja rendah, struktur ekonomi yang tidak stabil, kualitas tenaga kerja rendah, sumber daya manusia yang terbatas, dll., yang menyebabkan tantangan ekonomis untuk wilayah itu.

Kerja lapangan studi kasus di Vietnam terdiri dari berbagai kegiatan berikut:

- Lokakarya pemangku kepentingan yang partisipatoris secara online (19 Januari 2022)
- Tiga kelompok fokus yang terdiri dari anggota organisasi aktivis mahasiswa CoRe Vietnam di Cantho University (23 Januari 2022); anggota Green Rivers Vietnam, NGO (LSM) lingkungan yang berbasis di Cantho (13 Januari 2022); dan para anggota koperasi petani muda organik (11 Februari 2022)

- Penelitian yang terperinci tentang proyek pertanian sejak mulai hingga akhir untuk memahami motivasi, penghalang dan peluang untuk orang muda bagi transformasi pertanian
- 20 pemangku kepentingan utama mewawancarai pejabat-pejabat dari pemerintah setempat dan cabang-cabang Youth Union di seluruh Delta Mekong.

Temuan-temuan kami mendukung rekomendasi berikut:

- Memfasilitasi keterlibatan kaum muda dengan pemerintah setempat guna mempertinggi pengetahuan dan keterampilan mereka. Ini termasuk berjejaring, dukungan kebijakan dan keuangan.
- Memberdayakan pembangunan jaringan pembelajaran untuk memungkinkan serapan kebijakan dari inovasi lokal, terutama ketika orang muda secara kreatif terlibat dalam kegiatan pemecahan masalah dan sudah tertanam di universitas, NGO atau jaringan lainnya.
- Memfasilitasi keterlibatan jangka panjang kaum muda dengan berbagai isu lingkungan untuk menghindari banyak proyek jangka pendek yang dampaknya bagi kesadaran, perilaku, dan perbaikan lingkungan tidak berlangsung lama. Ini harus mencakup dukungan yang khusus ditujukan bagi kaum muda untuk menerjemahkan gagasan mereka menjadi aksi yang berdampak. Ini bisa termasuk skema pemerintah setempat yang mengenali kaum muda sebagai pembawa pengetahuan karena memang layak, dan yang memungkinkan mereka berjejaring dengan pelaku di luar pemerintahan untuk memfasilitasi pertukaran pengetahuan.
- Untuk memungkinkan yang tersebut di atas, pemerintah setempat juga memerlukan panduan yang lebih terperinci mengenai penerapan kebijakan pemerintah pusat. Ini termasuk pertanyaan tentang pengarusutamaan gender dan menjadikan kaum muda inklusif, tetapi juga dengan lebih luas cara mencapai suatu transisi ke ekonomi net-zero (nol karbon) yang adil secara sosial dan lingkungan.
- Sebagai bagian dari rekomendasi di atas, pertanyaan tentang keadilan hendaknya lebih menonjol dalam wacana politis dan sosial, yang pada saat ini pertanyaan-pertanyaan itu pada umumnya tidak ada. Ini juga memerlukan pengakuan akan keterampilan dan pengetahuan para pelaku selain para ilmuwan dan profesional lain, agar memanfaatkan potensi kaum muda dalam penciptaan transisi berkeadilan menuju dekarbonisasi di Vietnam.

Kesimpulan

Agar efektif, mengomunikasikan topik-topik terkait dekarbonisasi dan perubahan iklim kepada masyarakat dan kaum muda perlu dilakukan dengan cara dan bahasa yang dapat dipahami oleh mereka. Karena teknologi Informasi memainkan peran yang signifikan dalam kehidupan kaum muda, media sosial dan para *influencer* muda juga merupakan bagian penting dari pembahasan iklim. Para *influencer* muda merancang konten media sosial mereka dengan kata-kata sederhana, dikenal dan menggunakan konteks lokal serta kadang-kadang juga dalam bahasa setempat. Untuk menyampaikan pesan yang menarik dan agar dapat mencapai pengikut, para *influencer* menghubungkan antara berbagai isu perubahan iklim dan gaya hidup kaum muda. Sementara perubahan iklim dan berbagai isu ekologis menarik perhatian kaum muda secara online, riset kami memperlihatkan bahwa kaum muda kurang terlibat dalam perjuangan warga asli.

Banyak kebijakan nasional dan regional yang diasosiasikan dengan perubahan iklim, dekarbonisasi dan kelautan menyorot perlunya 'negara-negara maju' untuk membantu 'negara-negara berkembang' (seperti sebagian besar PIC) dalam gerakan menuju masa depan rendah karbon. Kendati hubungan ini berlangsung lama, namun, sebagian besar PIC juga bertujuan menjadi pemimpin global dengan mengimbau negara-negara penghasil emisi karbon yang besar untuk bertanggung jawab dan dalam tanggapan adaptasi mereka terhadap perubahan iklim di kawasan tersebut.

Terdapat ketegangan yang terus berlangsung dengan perwakilan PIC. Ketegangan ini berimplikasi bagi apa yang dianggap layak dalam konteks perubahan iklim, dekarbonisasi dan transisi berkeadilan. Sementara syarat terakhir dipahami dengan baik di Selandia Baru, di mayoritas negara bangsa, syarat terakhir tidak sering digunakan dan fokus terletak pada peralihan menuju produksi energi terbarukan dan cara terbaik menggunakan dan melestarikan sumber daya laut. Ada berbagai tantangan yang terlihat dengan kerja sama regional.

Terdapat pengakuan yang meluas oleh kelompok pemangku kepentingan tentang dampak besar dari perubahan iklim, terutama pada masyarakat pesisir dan negara-negara atol bepermukaan rendah. Dampak selisih perubahan iklim dan transisi menuju dekarbonisasi sehubungan dengan gender mulai diakui, tetapi dalam yang hal relatif sederhana yang gagal memandang kompleksitas dari ketumpangtindihan yang ada. Sebagian besar dokumen regional belum memasukkan kaum muda sebagai pemangku kepentingan atau peserta dalam pendekatan terhadap adaptasi perubahan iklim, dan tidak secara eksplisit memperhatikan risiko tertentu yang mungkin mereka hadapi berkaitan dengan penopang mata pencaharian mereka dan pengetahuan yang bersifat endogen. Dokumen kebijakan nasional pada umumnya lebih memperhatikan kaum muda dan kelompok termarginalkan lainnya tetapi mungkin belum melibatkan kaum muda dalam pembuatan dokumen tersebut.

Riset kami menyingkap bahwa kaum muda di Delta Mekong sangat sadar tentang keadaan lingkungan yang rapuh. Polusi sungai, kenaikan permukaan air laut, dan masalah umum perubahan iklim menonjol dalam diskusi-diskusi kami. Frustrasi memang sesuai dengan kurangnya pengaruh dari kaum muda pada proses pengambilan keputusan pemerintah dan berbagai upaya untuk terlibat dengan para pelaku pemerintah setempat sering kali gagal.

Diskusi kami menyorot bahwa kaum muda memiliki pengetahuan dan keterampilan dan bersedia belajar dan terlibat dalam adaptasi perubahan iklim di Delta Mekong. Mereka memiliki suara yang keras dan bersedia menjadikannya agar terdengar seperti melalui protes atau berbagai bentuk aksi yang berbeda (termasuk kampanye peningkatan kesadaran tentang mendaur ulang plastik untuk sungai yang lebih bersih, atau pertanian organik untuk membantu transformasi pertanian). Namun, ada kekurangan minat yang tampak dari pemerintah setempat untuk memanfaatkan berbagai gagasan dan kapasitas kaum muda.

Kampanye dan gagasan orang muda oleh karena itu sering terisolasi dari pembuatan dan implementasi kebijakan dan didukung terutama oleh NGO dan, dalam beberapa kasus, oleh universitas. NGO sering kali dipandang dengan kecurigaan oleh pemerintah setempat, dan seorang mahasiswa yang berbicara dengan kami menyampaikan bahwa pemerintah setempat menolak untuk terlibat dengan mereka atas dasar bahwa NGO terlibat dalam proyek-proyek mereka. Sementara itu kantor-kantor pemerintah dan Youth Union memiliki kegiatan mereka sendiri yang melibatkan orang muda. Oleh karena itu, muncul pemisahan yang jelas antara proyek yang dipimpin warga dan proyek yang dipimpin pemerintah, dengan sedikit interaksi di antara mereka atau sedikit sekali serapan kebijakan oleh para pejabat lokal dari kegiatan yang dipimpin masyarakat.

Referensi

ADB. (2021). *Just Transition Beyond the Energy Sector*. ADB Briefs NO 195

Astuti, R. (2021). 'Governing the ungovernable: the politics of disciplining pulpwood and palm oil plantations in Indonesia's tropical peatland'. *Geoforum*, 24, pp. 381-391.

Bradbury, B. (2021). *Climate reality leadership*. In *Conservation Science and Advocacy for a Planet in Peril* (pp. 199-216).

Brundtland, G. (1987). *Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future*. United Nations General Assembly document A/42/427.

Howson, P. (2017). 'Intimate Exclusions from the REDD+ forests of Sungai Lamandau, Indonesia'. *Conservation and Society*, 15(2), p.125.

Howson, P. and Kindon, S., (2015). 'Analysing access to the local REDD+ benefits of Sungai Lamandau, Central Kalimantan, Indonesia'. *Asia Pacific Viewpoint*, 56(1), pp. 96-110.

IMF. (2021). 'Asia-Pacific, the Gigantic Domino of Climate Change'. *IMF Blog*. Access online: <https://blogs.imf.org/2021/03/25/asia-pacific-the-gigantic-domino-of-climate-change/>

Khan, S. A. R. (2019). 'The nexus between carbon emissions, poverty, economic growth, and logistics operations-empirical evidence from southeast Asian countries'. *Environmental Science and Pollution Research*, 26(13), pp. 13210-13220.

Lee, S., Truong An, D. (2018). 'Spatio-temporal variations in meteorology drought over the Mekong River Delta of Vietnam in the recent decades'. *Paddy and Water Environment*, 17.

Mendelsohn, R., Dinar, A., & Williams, L. (2006). 'The distributional impact of climate change on rich and poor countries'. *Environment and Development Economics*, 11(2), 159-178

Miller, M., Alfajri, A., Astuti, R., Grundy-Warr, C, Middleton., C, Tan, D.Z., Taylor, D. (2021). 'Hydrosocial rupture: causes and consequences for transboundary governance'. *Ecology and Society*, 26(3):21.

Nathaniel, S. P. (2021). *Environmental degradation in ASEAN: Assessing the criticality of natural resources abundance, economic growth and human capital*. Environmental Science and Pollution Research.

Oxfam. (2017). *Towards a more equal Indonesia: How the government can take action to close the gap between the richest and the rest*.

Renaud, F. G., & Kuenzer, C. (2012). *The Mekong Delta System: Interdisciplinary Analyses of a River Delta*. Springer Netherlands.

Vu, D. T., Yamada, T., & Ishidaira, H. (2018). 'Assessing the impact of sea level rise due to climate change on seawater intrusion in Mekong Delta, Vietnam'. *Water Science and Technology: A Journal of the International Association on Water Pollution Research*, 77(5-6), pp. 1632-1639

Wardana, IGAM. (2021). *The Risk of protecting the environment: A Southeast Asian Perspective*. Research Proposal. Max Planck Institute and Humboldt Foundation.

World Bank. (2020). *Enabling private investment in climate adaptation and resilience: Current status barriers to investment and blueprint action*. Washington: World Bank and GFDRR.

Tentang the Academy

The British Academy adalah suatu korporasi independen dengan tata kelola mandiri, terbentuk dari hampir 1.000 Fellow Inggris dan 300 Fellow dari luar negeri yang dipilih sebagai penghargaan atas prestasi istimewa mereka sebagai ilmuwan dan peneliti. Objektif, wewenang dan kerangka kerja tata kelola ditetapkan dalam Piagam dan Peraturan-peraturan pendukungnya, sebagaimana disetujui oleh Privy Council. The Academy menerima pendanaan publik dari anggaran Science and Research (Ilmu Pengetahuan dan Penelitian) yang dialokasikan melalui hibah dari Department for Business, Energy and Industrial Strategy (BEIS). The Academy juga menerima bantuan dari sumber-sumber swasta dan memanfaatkan dananya sendiri. Pandangan dan kesimpulan yang diungkapkan di sini belum tentu didukung oleh para Fellow secara perorangan tetapi dihargai sebagai menyumbang untuk debat publik.

The British Academy adalah akademi nasional Inggris untuk ilmu-ilmu humaniora dan sosial. Kami memobilisasi berbagai disiplin ini untuk memahami dunia dan membentuk masa depan yang lebih cerah.

Dari kecerdasan buatan (AI) hingga perubahan iklim, dari membangun kemakmuran hingga meningkatkan kesejahteraan—berbagai tantangan kompleks masa kini hanya dapat dipecahkan dengan memperdalam wawasan kita ke orang-orang, budaya dan masyarakat.

Kami berinvestasi dalam para peneliti dan berbagai proyek di seluruh Inggris dan luar negeri, melibatkan publik dengan pemikiran dan debat yang segar, dan menyatukan kaum ilmuwan, pemerintah, bisnis dan masyarakat sipil untuk memengaruhi kebijakan demi keuntungan semua orang.

The British Academy
10–11 Carlton House Terrace
London SW1Y 5AH

Badan amal terdaftar no. 233176

thebritishacademy.ac.uk
Twitter: @BritishAcademy_
Facebook: TheBritishAcademy

Diterbitkan pada bulan Februari 2023

© Para penulis. Ini adalah penerbitan dengan akses terbuka yang berlisensi di bawah Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 Unported License

Untuk mengutip laporan ini: British Academy (2023), *Mengeksplorasi Peluang, Tantangan dan Kompromi Menuju Transisi Berkeadilan untuk Dekarbonisasi*, The British Academy, London

doi.org/10.5871/just-transitions-a-p/P-H-S-K-Indonesian

Desain oleh Only